

Musrenbang Batola 2011 Perhatikan Skala Prioritas

Marabahan, KP - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2011 tingkat Kabupaten setempat, Kamis (18/3), di Aula Selidah Marabahan.

Musrenbang yang diselenggarakan Bappeda Batola tersebut, dihadiri Bupati H Hasanuddin Murad, Ketua DPRD H Husain Akhmad, unsur Muspida, Wabup H Sukardhi, para wakil ketua dan anggota DPRD Batola, Sekda Ir Supriyono, para asisten, staf ahli, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel diwakili Kasubbid Pengendalian Ir Endang Syamsudin MSi, Ketua Bappeda Batola Ir H Rahimul Yakin MSi, para pimpinan SKPD, camat di lingkup Pemkab Batola, kades/lurah.

Bupati

Batola H Hasanuddin Murad, saat membuka Musrenbang mengatakan, tahun anggaran 2011 merupakan tahun keempat bagi dirinya dan Wabup H Sukardhi diberi kepercayaan untuk memimpin Kabupaten Batola guna menyelenggarakan pemerintahan sampai tahun 2012.

“Hal ini,

memberikan makna bahwa kegiatan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun 2011, harus menjadi langkah berkesinambungan yang menjadi tahun evaluasi utama atas rencana capaian kinerja lima tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya,” ujarnya.

Kinerja dimaksud. Sambungnya, merupakan hasil kumulatif dari kegiatan pembangunan tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010 yang sekaligus akan melengkapi kekurangan atas target kinerja yang telah diproyeksikan dalam kurun waktu sampai dengan akhir pembangunan jangka menengah di tahun 2012.

Terkait dengan itu, Bupati Hasan, dalam arahnya mengharapkan

setiap

rumusan perencanaan pembangunan yang diformulasikan dalam Musrenbang, tidak terlepas dari tuntutan rangkaian pola pikir, berupa proyeksi substansi visi dan misi menjadi program dan kegiatan pembangunan yang lebih rinci.

Selain itu, pembahasan Musrenbang hendaknya tetap mengacu kepada pencapaian visi berupa 5 butir misi yang dirumuskan yakni pencapaian pembangunan infrastruktur perdesaan yang komprehensif dan terpadu, reformasi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), peningkatan kualitas SDM dari berbagai sektor dan layanan, melaksanakan pembangunan daerah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat melalui adaptasi partisipasi berbagai pihak, serta membangun akses dan jaringan kerjasama di berbagai sektor.

Bupati

Hasan mengharapkan, dalam Musrenbang tidak mengenal diskriminasi dalam meloloskan dan meluluskan kegiatan pembangunan beserta anggarannya. ``Oleh sebab itu, untuk mengakomodasikan usulan kegiatan pembangunan hendaknya diperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan penentuan skala prioritas yang ditinjau dari aspek sosiopolitik, teknologi, partisipasi, serta aspek {{bottom up dan top down}},’’ pesan bupati.

Disarankannya, prioritas pembangunan agar selalu diorientasikan pada sektor perdesaan, diproyeksikan bagi aktivitas perekonomian masyarakat desa melalui fasilitasi akses sumber daya produktif yang sekaligus merupakan upaya pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua DPRD Batola H Husain Akhmad mengatakan, aspirasi masyarakat sangat berguna dalam penyusunan Musrenbang, karena merupakan informasi serta masukan bagi pemerintah dalam menentukan arah dan langkah kebijakan yang akan diambil, sehingga pembangunan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran.

``Aspirasi serta usulan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan, agar masyarakat ikut terlibat dan merasa memiliki serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah,’’ harapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kalsel melalui Kasubbid Pengendalian Ir Endang Syamsudin MSi, memberikan beberapa pandangan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan.

Beberapa pandangan tersebut diantaranya ditinjau dari aspek kinerja pembangunan manusia yang diukur dari IPM tahun 2008, aspek PDRB perkapita tahun 2007, di mana Batola berada di peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota, aspek angka kemiskinan tahun 2008, Batola berada di peringkat 9 dari 13 kabupaten/kota, aspek pertumbuhan ekonomi, serta sejauhmana pelayanan publik dan prasarana dasar masyarakat telah terpenuhi. (K-6)